

KEKUASAAN NEGARA DALAM STRUKTUR ADAT MASYARAKAT MIANGAS ¹

**Oleh : ZENITH TIMOTIUS MALLI ANAADA²
NIM : 0908145039**

ABSTRACT

Characteristics of the border region is often described as the outermost regions are isolated, backward, and so forth. With the myriad of issues concerning the welfare of society in general were below the poverty line with low levels of education. But life does not always belong to border communities in naming above, Miangas for example, the community has its own traditions how to survive in conditions of isolation and backwardness, have skills in producing seafood, farming and other skills. Long before the existence of state power, the unit from Miangas sides of residence lives bound by customs and a sense of shared identity.

Results from this research show that, due to the presence of markers of the state's power infrastructure in this locations, many facilities built by the government in Miangas impressed as empty and wasteful projects that looks abandoned. As well as the presence of power by government intervention ultimately weaken the social institutions in lives of indigenous people, and tends to make people more spoiled and more pragmatic, and left the local wisdom and traditional values that have been practiced for generations by their ancestors and was bequeathed to offspring.

Conclusion of this study, the Miangas known as hard working people, many skills are acted by people in meeting their needs, such as reliable in making boats, intelligent processing of marine products such as making wooden fish (smoked fish) and salted fish being traded to the island- Talaud large island in the district. But when the excessive government interference in the end there is a change in society itself and shift traditional values. Neglect of traditional values by society, increasingly indicates that the presence of state power in Miangas, indicating the government has failed in maintaining traditional values, language and traditions into local wisdom as mandated in the constitution of this country, which is poured into 1945. Should society and government both have important roles in maintaining the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia to maintain local knowledge as part of the national defense.

Keywords: Power, the State, Indigenous Peoples

¹ Merupakan Skripsi Penulis sebagai syarat untuk meraih gelar S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi

PENDAHULUAN

Karakteristik wilayah perbatasan bagi sebagian orang seringkali digambarkan sebagai wilayah terluar yang terisolir, terbelakang, halaman belakang, pagar belakang, penuh dengan segudang permasalahan menyangkut tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya berada di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Namun dalam penamaan ini yang seringkali dilupakan oleh sebagian orang bahwa kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan tidak selamanya tergolong apa yang disebutkan diatas, disetiap wilayah masyarakat memiliki budaya dan tradisi berbeda bagaimana bertahan hidup dalam kondisi keterisolasian dan ketebelakangan.

Seperti yang di ungkapkan oleh Ralp Linton dimana kegiatan-kegiatan kebudayaan atau *culture activity* di bagi ke dalam *trait complex*, misalnya sebagai contoh masyarakat memiliki ketrampilan dalam proses pencaharian hidup dan ekonomi, dengan mengandalkan hasil alam seperti melaut, bercocok tanam dan peternakan (Ralp Linton, 1936: 397). Apabila dicermati hal ini merupakan kearifan lokal. Demikian halnya jauh sebelum adanya program pembangunan di wilayah perbatasan, masyarakat yang oleh Koentjraningrat disebut sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang bersifat mantap dan terikat oleh satuan adat istiadat dan rasa identitas bersama (Koentjraningrat, 2009:120).

Wilayah perbatasan sebagai garis pangkal penentu kedaulatan NKRI, perlu adanya perhatian khusus baik dari segi pembangunan infrastruktur dan suprastruktur, pembangunan kualitas sumber daya manusia, sampai pada pembangunan pusat penyelenggara kekuasaan negara yang memberi pelayanan terhadap masyarakat. Namun persoalan yang dihadapi sekarang wilayah perbatasan yang diwacanakan sebagai “beranda depan” ternyata masih jauh dari harapan dan tinggallah sebuah wacana. Dengan adanya kehadiran kekuasaan negara bukan memoles wilayah perbatasan menjadi wilayah terdepan, malah cenderung membuat masyarakat untuk terus bergantung kepada pemerintah dan meninggalkan tradisi-tradisi yang dulu terpelihara, seperti nilai-nilai atau norma-norma adat-istiadat dan keterikatan oleh suatu rasa identitas komunitas (Maciver dan Page dalam Koenjtraningrat, 2009:119).

Seperti yang dikatakan oleh Burhan Bugin kajian tentang masyarakat sipil atau *civil society* penting di kaji setelah dominasi kekuasaan negara begitu kuat. Selain menjadikan masyarakat sipil tidak berdaya, dominasi kekuasaan negara dapat menunjukkan fakta bahwa seakan-akan pembangunan yang dilakukan oleh Negara ditunjukan bagi kepentingan rakyat (Burhan Bugin, 1993: 6), namun kenyataannya malah kekuasaan Negara yang pada umumnya terlalu dominan lebih cenderung memberikan efek negatif terhadap kearifan lokal masyarakat adat di Miangas, di sisi lain masyarakat sendiri tidak mampu untuk mempertahankan kearifan lokal yang ada.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuasaan negara terhadap struktur adat masyarakat Miangas?
2. Mengapa terjadi perubahan atau pergeseran nilai adat ketika pemerintah melakukan intervensi kekuasaan di Miangas?

Manfaat dan Tujuan Penelitian.

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:
-

1. Untuk mengetahui sejauh mana kekuasaan negara terhadap struktur adat masyarakat Miangas!
2. Untuk mengetahui Sejauhmana terjadinya perubahan atau pergeseran nilai-nilai adat ketika pemerintah melakukan intervensi kekuasaan di Miangas!
- b. *Manfaat Ilmiah*, bahwasannya penelitian ini kiranya dapat memberikan kontribusi berarti untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan terlebih khusus bagi Program Studi Ilmu politik.
Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi terselenggaranya program pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan yang sesuai dengan karakteristik wilayah perbatasan, agar ke depan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah tepat dan berguna bagi masyarakat perbatasan, guna untuk menjaga tetap tegaknya keutuhan dan kesatuan NKRI.

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Kekuasaan

1. Menurut Robert M. Mac Iver, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia (Robert M. Mac Iver, 1961:87).
2. Menurut Negel, kekuasaan adalah suatu hubungan kausal nyata atau potensial antara yang disukai oleh yang berbuat sehubungan dengan hasil dan hasil itu sendiri (Negel dalam Robert Dahl "Analisis Politik Modern, 1980; 169).
3. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, kekuasaan adalah hubungan antara yang berkuasa dan yang di kuasai, atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau karena terpaksa (Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, 1964:337).
4. Menurut Soerjono Soekanto, kekuasaan adalah suatu kemampuan memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya (Soerjono Soekanto, 1981:163)
5. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu (Max Weber (Max Weber, *Essay in Sociology, translated and edited by H-H Gerth and C. Wright Mills*. 1946: 180).
6. Gilbert W. Fairholm mendefinisikan kekuasaan sebagai "kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka" (Gilbert W. Fairholm, *Organizational Power Politics: Tactics in Organizational Leadership*, 2009:5).
7. Stephen P. Robbins mendefinisikan kekuasaan sebagai "... kapasitas bahwa A harus mempengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh A. Definisi Robbins menyebut suatu "potensi" sehingga kekuasaan bisa jadi ada tetapi tidak dipergunakan. Sebab itu, kekuasaan disebut sebagai "kapasitas" atau "potensi" (Stephen P. Robbins, 2009:15).
8. Menurut *Harold D Laswell* dan *Abraham Kaplan* mendefinisikan kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau

kelompoklain agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama.(Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Leo Agustino, 2007:72).

Unsur-Unsur dan Saluran-Saluran Kekuasaan

Kekuasaan dapat di jumpai dalam hubungan sosial di antara manusia maupun antar kelompok, adapun menurut (Soerjono Soekanto 1981:164-166) membaginya sebagai berikut:

1. Rasa takut
2. Rasa cinta
3. Kepercayaan
4. Pemujaan

Selain dari keempat unsur diatas, di dalam masyarakat Soerjono Soekanto membagi serta membatasinya ke dalam beberapa saluran-saluran, antara lain sebagai berikut;

1. Saluran Militer
2. Saluran Ekonomi
3. Saluran Politik
4. Saluran Tradisi
5. Saluran Ideologi
6. Saluran-saluran lainnya

Bentuk Pelapisan-pelapisan Kekuasaan

Adapun menurut Soekanto sosiolog dari Indonesia, memandang bentuk kekuasaan pada satu pola umum dari sekian banyak pola dalam masyarakat.Yaitu, bahwa dalam bentuk dan sistem kekuasaan selalu menyesuaikan dirinya pada masyarakat dengan adat-istiadat perikelakuannya (Soerjono Soekanto, 1981:169).Adapun bentuk pelapisan-pelapisan kekuasaan sebagai berikut:

Wewenang

Menurut Soerjono Soekanto, wewenang adalah hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan (Soerjono Soekanto, 198:172).

1. Wewenang kharismatis, tradisionil dan rasionil (legal).
2. Wewenang resmi dan tidak resmi
3. Wewenang pribadi dan territorial
4. Wewenang terbatas dan menyeluruh

Konsep Negara

Hakekat pengertian tentang Negara pada dasarnya merujuk pada konsep kebangsaan, dimana dari kata dasar “Bangsa”.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Depdikbud halalam 89, bahwa bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri(Sumarsono, dkk. “Pendidikan Kewarganegaraan”, 2005:8).Menurut Parangtopo (1993) kebangsaan adalah sebagai tindak-tanduk kesadaran dan sikap yang memandang dirinya sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan Sosiokultural yang disepakati bersama untuk hidup bersama membentuk organisasi yang disebut negara (Idup Suhady dan A.M. Sinaga, 2009:4).Adapun beberapa konsep negara sebagai organisasi kekuasaan politik menurut para ahli sebagai berikut:

1. George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu (George Jellinek dan Efriza, 2008:43).
2. Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah bagian dari integrasi kekuasaan politik dan merupakan organisasi kekuasaan politik, yang merupakan alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Miriam Budiardjo, 2006; 38).
3. Menurut R. Djokosoetono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama (R. Djokosoetono dalam Indup Suhady dan A. M. Sinaga, 2009:6).
4. Menurut Harold J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat (Harold J. Laski dalam Miriam Budiardjo, 2006: 39).
5. Menurut Epicurus, negara adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia, yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya (Epicurus dalam Soehino, 1986:31).
6. Menurut Norberto Bobbio, negara adalah dimana kekuasaan public diatur oleh norma-norma umum (yang fundamental maupun konstitusional) dan ia harus dijalankan dalam pengaturan undang-undang, di mana warga Negara mempunyai hak perlindungan dari jalan-jalan lain untuk menuju kepada satu pengadilan yang mandiri dalam upaya menegakkan aturan main dan berjaga dari penyalahgunaan atau tindakan berlebihan dari kekuasaan (Norberto Bobbio dalam Ali Sugihardjanto, dkk. 2003; 154).
7. Menurut Thomas Aquinas berangkat dari pemikiran klasiknya, negara adalah lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil, seperti desa dan kota (Thomas Aquinas Efriza, 2008:43).
8. C.F. Strong seorang pemikir modern, dimana dalam perumusannya negara merupakan masyarakat yang terorganisir secara politik, negara sebagai suatu masyarakat teritorial yang dibagi menjadi yang memerintah dan di perintah (C.F. Strong, 2004; 5-7).

Menurut Ahli berkebangsaan Inggris L. Oppenheim, sebuah negara berdiri bila suatu bangsa telah menetap di suatu negeri dibawah pemerintahannya sendiri”, definisi ini mencakup 4 unsur yang sangat jelas, rakyat, wilayah, pemerintahan dan sifat kedaulatannya (Oppenheim dalam J. Frankel, 1991: 9-13), adapun penjelasan unsur-unsur negara menurut Oppenheim sebagai berikut:

1. *Rakyat*
2. *Wilayah*
3. *Pemerintahannya*
4. *Kedaulatan*

Selain apa yang disebutkan diatas, negara memiliki tujuan dan fungsi negara. Adapun tujuan negara sebagai berikut;

1. Menurut Miriam Budiardjo negara dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama, dimana tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (Miriam Budiardjo, 2006:45).
2. Negara sebagai organisasi kekuasaan teori ini dianut oleh H.A.Logemann dalam bukunya *Over De Theorie van Een Stelling Staatsrecht*. Dikatakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi (H. A. Logemann, 1948).
3. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya “berkembang” serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin” (R. H. Soltau dalam Miriam Budiardjo,2006:45).

Selain daripada tujuan dan fungsi diatas, Negara yang oleh Soekanto pada umumnya memiliki kekuasaan yang secara formil negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, kalau perlu dengan paksaan; juga negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya (Soerjono Soekanto, 1981:164).

Konsep Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman (Koenjtraningrat,2009:16).

1. Menurut Koentjaraningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas tertentu (Koenjtraningrat, 2009;118).
2. Menurut Mac Iver dan Page, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaantata-cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia, keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah (R. M. Mac Iver and Charles H. Page, 1961: 5).
3. Menurut S. R. Steinmetz, masyarakat adalah sebagai kelompok manusia yang terbesar dan yang meliputi pengelompokan yang lebih kecil, yang mempunyai hubungan erat dan teratur (S. R. Steinmetz dalam Harsojo, 1967: 145).
4. Menurut Miriam Budiardjo, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (Miriam Budiardjo, 2006;39).
5. Menurut Warner,masyarakat adalah “suatu kelompok perorangan yang berinteraksi timbal balik(Warner dalam Pokok-pokok Antropologi Budaya. Editor , T.O Ihromi, 1996;107).
6. J. L.Gillin dan J. P. Gillin dalam buku mereka *Cultural Sociology* (1954:139), bahwa masyarakat atau society adalah “*the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes and feelings of unity are operative*”. (J. L. Gillin dan J.P. Gillin dalam Koenjtraningrat, 2009; 118).

Organisasi Sosial atau Struktur Masyarakat

Melville J. Herskovits,antropolog berkebangsaan Amerika, mengemukakan bahwa organisasi sosial atau struktur masyarakat dapat dilihat dari pranata-pranata yang menentukan kedudukan lelaki dan perempuan dalam masyarakat, dan dengan demikian menyalurkan hubungan pribadi mereka (Melville J. Herskovits dalam Ihromi, 1996;82). Melvillemembagi lagi pranata-pranata dalam dua kategori yaitu, pranata yang tumbuh dari hubungan kekerabatan dan pranata dari hasil ikatan antara individu berdasarkan keinginan sendiri.

Pranata Sosial Atau Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Koenjtraningrat, pranata adalah suatu sistem norma khusus menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan pola khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat (Koenjtraningrat, 2009:133).

Dari semua hal mengenai apa yang telah dijabarkan oleh Koenjtraningrat diatas, kesemuanya itu dapat tercapai karena adanya interaksi sosial antarindividu dan kelompok dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, dikatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam struktur sosial adalah interaksi sosial dan lapisan-lapisan sosial (Soerjono Soekanto, 1981:192). Adapun ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial menurut (Gillin and Gillin dalam Soerjono Soekanto, 1981:84), sebagai berikut:

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi daripada pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari lembaga yang bersangkutan.
5. Adanya lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan, mempunyai suatu tradisi yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata-tertib yang berlaku dan lain-lain.

Selain daripada ciri-ciri lembaga kemasyarakatan diatas, Gillin dan Gillin mengklasifikasikan beberapa tipe lembaga kemasyarakatan dari berbagai sudut pandang, sebagai berikut:

1. *Crescive institutions* dan *enacted institutions* yang merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya.
2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas *Basic institutions* dan *subdiary institutions*.
3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *aaproved* atau *social sanctioned-institutions* dan *unsanctioned institutions*.
4. Perbedaan antara *general istitutions* dengan *restricted institutions*, timbul apabila klasifikasi timbul didasarkan pada faktor penyebarannya.
5. Akhirnya dari sudut fungsinya, terdapat perbedaan *operative institutions* dan *regulaitve institutions*.

Intervensi Politik (Negara) dalam Struktur Masyarakat Adat Di Indonesia

Dalam konteks NKRI, di zaman orde baru (Soeharto) negara dijalankan dengan skema totaliter berbasis militer, hal ini telah memberikan pengaruh besar pada penciptaan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era reformasi ada pergeseran serta adanya dekadensi terhadap nilai-nilai adat dalam komunitas masyarakat, hal ini diakibatkan adanya campur tangan (intervensi) negara yang berlebihan terhadap pranata sosial didalam masyarakat.

Menurut Adumiharja Kusnaka, bahwa selama ini para perencana pembangunan nasional di Indonesia menganggap nilai budaya masyarakat sebagai simbol keterbelakangan. Dengan adanya UU No 72 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 1999 “Tentang Pemerintahan Desa”, adalah ‘puncak’ dari kebijakan intervensi Negara sejak masa kolonial hingga nasional sekarang yang melumpuhkan kekuatan modal sosial, dan sekaligus merampas hak-hak komunal yang melekat pada ulayat (wilayah kehidupan) dari entitas sosial yang disebut ‘masyarakat hukum adat’ di Negara ini (Zakaria, 2000).

Menurut Imam Soetiknya, akibat pemerintah menyalahgunakan UUPA No. 5 Tahun 1960, maka yang terjadi adalah suku-suku bangsa dan masyarakat adat yang tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari satu bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang wewenangnya berdasarkan hak rakyat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah, yang dahulu mutlak berada di tangan kepala suku atau masyarakat hukum adat sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya, dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi, pemegang hak menguasai tanah ulayat wilayah Negara (Imam, Soetiknya, 1990; 20).

Di dalam UUD 1945 Amandemen IV, pasal 28I ayat 3, pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, serta UU Nomor 32 Tahun 2004. Dimana negara menghormati dan menghargai serta memelihara bahasa, budaya masyarakat tradisional sebagai budaya nasional yang selaras dengan perkembangan zaman.

Masyarakat Adat dan Kelembagaan Adat

Konsep Masyarakat Adat

Istilah masyarakat adat mulai mendapat perhatian dunia setelah pada tahun 1950-an sebuah badan dunia di PBB bernama ILO (*International Labour Organization*) mempopulerkan isu tentang "*Indigenous peoples*" dimana istilah ini digunakan ILO untuk sebutan terhadap entitas "penduduk asli" (ILO dalam Keraf, 2010).

Keraf menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok lainnya (Keraf, 2010:362), adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian tarian, cara hidup, peralatan hidup, termasuk untuk mencari nafkah.
4. Mereka memiliki bahasa sendiri.
5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Masyarakat dengan pola orientasi kehidupan tradisional, yang tinggal dan hidup di desa. Menurut Suhandi ada beberapa sifat umum yang dimiliki masyarakat tradisional (Suhandi dalam Ningrat, 2004:4):

1. Hubungan atau ikatan masyarakat desa dengan tanah sangat erat.
2. Sikap hidup tingkah laku sangat magis religius.
3. Adanya kehidupan gotong-royong.
4. Memegang tradisi dengan kuat.
5. Menghormati para sesepuh.
6. Kepercayaan pada pemimpin loka dan tradisional.
7. Organisasi yang relatif statis.
8. Tingginya nilai-nilai sosial.

Lembaga Adat *Ratu mbanua* dan *Inangngu wanua*

Di Zaman dahulu pemerintahan desa dilaksanakan secara adat oleh Ratumbanua dan Inangnguwanua, mereka dianggap oleh sebagian masyarakat Talaud dan Miangas khususnya sebagai kepala yang membawahi beberapa suku atau klan, dan dianggap sebagai pemimpin dari beberapa kepala suku. Istilah pemerintah desa adat tersebut disesuaikan dengan kemauan penguasa pada saat itu, dan setelah adanya perkembangan pembagian wilayah Zending, maka terjadilah keputusan Residen Manado pada tanggal 1

April 1902 yang mencantumkan pengakuan terhadap wilayah ke-*jogugu*-andi kepulauan Talaud maka saat itu juga di mulai pemerintahan desa.

1. *Ratuntampa* adalah seseorang yang memegang tampuk pimpinan adat yang membawahi pimpinan adat, (*Ratunbanua* dan *Inangnguwanua* dari beberapa desa/kampung).
2. *Inangngu tampa* sama dengan *ratuntampa* hanya di bedakan tugas dan fungsinya.
3. *Ratu mbanua* adalah seseorang yang memegang tampuk pimpinan adat bersama-sama Inangngu wanua di suatu desa/kampung.
4. *Inangngu wanua* adalah seseorang yang memegang pimpinan adat bersama *Ratu mbanua* di kampung, dia sebagai wakilnya *Ratu mbanua*.
5. *Timade ruanga/Inangngu ruanga* adalah seseorang yang memimpin rumpun keluarga yang disebut suku.

Adapun istilah *ruanga* dalam istilah Indonesia adalah panguyuban, rukun, atau suku (Hoetagaol dkk, 2012:19).

Ratu mbanua dan Inangngu wanua dalam Struktrur Pemerintahan Desa

Pada era demokratisasi sebagaimana tengah berjalan di desa, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki (Setiawan, 2009). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara.

Masuknya *ratu mbanua* sebagai pemangku adat dalam keanggotaan BPD memperjelas peranan ratumbanua dalam penetapan peraturan desa bersama Kepala desa, termasuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatnya. Selain posisi *ratu mbanua* dalam keanggotaan BPD, ada beberapa kelembagaan desa dimana Ratumbanua serta perangkatnya berperan di dalamnya yang sudah dikenal dalam rangka pembangunan daerah pedesaan adalah Lembaga Ketahanan Desa (LKMD) dan Koperasi Unit Desa. Hubungan *ratu mbanua* sebagai lembaga adat dalam lembaga kemasyarakatan secara hukum nasional Indonesia maka kedudukan tugas dan fungsi Lembaga adat *ratu mbanua* sebagai mitra pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang artinya “masalah” yang dibawa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi, dan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dalam kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini juga masih bersifat holistik, belum jelas, kompleks, dinamis dan penuh makna serta bersifat alamiah (Sugiyono, 2011:9). Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Antropologi politik dimana kajian ini memusatkan perhatiannya pada “*Hubungan antara struktur dan masyarakat dengan struktur dan tebaran kekuasaan dalam masyarakat tersebut* (Koentjaraningrat “ Sejarah Teori Antropologi, hal 196-226).

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif-naturalistik peneliti akan lebih banyak *menjadi instrumen*, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan *key instruments* (Sugiyono, 2011:92).

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini dan yang mengacu pada fokus masalah yang terjadi di Miangas, maka penelitian ini berlokasi di Desa Miangas Kecamatan Khusus Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud.

Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, dengan berbagai pertimbangan antara lain, faktor jarak yang ditempuh, tenaga, waktu, dan dana, maka peneliti memfokuskan penelitian hanya di Kecamatan Khusus Miangas, Desa Miangas, Dimana fokus kajiannya adalah melihat fenomena dari kekuasaan negara dalam struktur adat masyarakat Miangas dan mengapa terjadi perubahan atau pergeseran nilai adat ketika pemerintah melakukan intervensi kekuasaan di Miangas.

Jenis Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono di dalam pengumpulan data ada dua sumber data, pertama *sumber primer* adalah sumber data yang *langsung memberikan* data kepada pengumpul data, dan sumber *sekunder* merupakan sumber yang *tidak langsung memberikan* data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, hasil yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan (Sugiyono; 224).

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2011), dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi (Sugiyono, 2011:216). Mengutip juga pendapat Spradley dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) (Spradley dalam Sugiyono, 2011:215). Dimana penulis sendiri sebagai instrumen dalam penelitian ini, penulis turun langsung ke tempat dimana menjadi fokus penelitian, mewawancarai nara sumber, partisipan, informan yang dianggap tahu dengan situasi dan kondisi Miangas, atau yang lebih berkompeten dan memiliki pengaruh di tempat itu. Serta mengamati secara langsung aktivitas warga masyarakat yang ada di Miangas. Penentuan sumber data orang-orang yang diwawancarai yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu, dan masih bersifat sementara. Informan dalam hal ini kepala desa, ketua BPD, Ratumbanua dan Inangnguwanua, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Prosedur Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2011; 245).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pembangunan Di Miangas

Pengalaman pahit Indonesia kalah dari Malaysia dalam memperebutkan Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional (Ulaen, dkk. 2012;164), membuat pemerintah ekstra hati-hati dalam menjaga wilayah teritorialnya. Pasca Soeharto, adanya pergeseran pencitraan atas Miangas dan pulau perbatasan lainnya, kalau dulu Miangas dianggap sebagai wilayah terluar, dan pos pintu keluar-masuk para pelintas-batas, maka sekarang dalam setiap program pembangunan diwacanakan sebagai “beranda depan” benteng Pancasila. Begitu banyak fasilitas yang dibangun oleh pemerintah di wilayah paling utara Sulawesi utara ini. Namun banyak fasilitas-fasilitas aparatur sipil yang dibangun untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat hanya terbengkalai dan dibiarkan kosong akibatnya rusak dan terkesan hanyalah proyek mubazir.

Selain hal diatas ada beberapa bangunan yang disediakan pemerintah sebagai tempat penampungan kebutuhan pokok masyarakat seperti, depot logistik, 4 buah tangki BBM. Sejak dibangun pada tahun 2007 sampai sekarang terbengkalai dan hanya menjadi tempat penyimpanan karung semen dan menjadi tempat bagi rayap dan kepiting laut. Perhatian pemerintah terhadap pulau Miangas yang jumlah penduduknya sebanyak 209 KK, yang didalamnya berjumlah 762 jiwa, dengan disediakannya berbagai fasilitas oleh pemerintah, apabila dilihat sepiantas memang terkesan negara dan orang-orang yang bernaung didalamnya begitu serius dalam menangani persoalan di wilayah perbatasan. Namun dari segi lain malah terlihat berlebihan, jika dibandingkan dengan pulau-pulau yang berdekatan dengan Miangas yang dulunya merupakan satu kesatuan administratif dari kecamatan Nanusa, seperti pulau Marampit dan kecamatan Nanusa sendiri yang juga sebagai pulau terluar.

Para Pelaut Handal Dari Utara NKRI

Generasi tua di Miangas merupakan generasi terakhir pendukung “*tradisi bahari*”, mereka merupakan para pelaut-pelaut handal tanpa harus menggunakan layar disaat tidak berangin untuk mencapai pulau-pulau terdekat, seperti pulau-pulau yang ada di selatan daratan Filipina (Mindanao). Dimana tujuan mereka adalah menjajakan hasil olahan tangkapan mereka dilaut dan hasil lain dari masyarakat Miangas seperti tikar-pandan, kopra (Ulaen, dkk. 2012;67-68). Tradisi bahari yang sejak dulu ada dikalangan generasi tua di Miangas, sekarang mulai kehilangan identitas sebagai pelaut handal, pembuat perahu, dan ulet dalam pekerjaan khususnya sebagai seorang nelayan yang mahir dalam membaca perbintangan. Masyarakat lebih memilih menjadi buruh di pelabuhan disaat ada kapal yang masuk, dengan gaji seadanya asalkan dapat memenuhi kebutuhan hari ini, di sisi lain Miangas yang kaya akan sumberdaya kelautan tidak dimanfaatkan secara optimal. Tradisi yang dilakoni oleh generasi tua kini tidak lagi dipraktekkan oleh para

generasi muda Miangas yang ada hanyalah kenangan manis yang tersirat dan tidak pernah tertulis.

Tradisi *Mamancari* Sebagai Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Miangas.

Pada zaman dulu hingga pertengahan abad ke 20, masyarakat Miangas sama seperti halnya masyarakat yang ada di bagian bumi manapun pada umumnya, manusia memiliki strategi atau cara bagaimana harus bertahan hidup. Masyarakat Miangas pada umumnya di zaman dulu mengandalkan hasil laut, pertanian dan hasil kerajinan tangan yang dijual baik di pulau-pulau Talaud maupun di pulau-pulau daratan Mindanao, namun sekarang tradisi melaut mulai hilang sejak adanya bantuan pemerintah berupa sembilan bahan pokok di Miangas, walaupun ada yang melaut itu hanya untuk keperluan makanan. Sedangkan hasil seperti keterampilan membuat ikan kayu (ikan asap) yang mereka dapat disaat mereka bekerja di perusahaan ikan Jepang yang ada di Filipina, dan kerajinan tangan seperti tikar serta topi anyaman dari daun pandan tidak lagi ditemukan.

Masyarakat lebih memilih membuka warung untuk berjualan, sementara tempat bertumbuhnya kelapa sebagai sumber mata pencaharian dan *laluga* atau *puraha* sebagai bahanmakanan yang mereka andalkan disaat kehabisan bantuan, sekarang menjadi tempat landasan pacu pesawat dimana proyek pemerintah cukup menelan biaya besar.

Kelembagaan Adat (*Ratu mbanua* Dan *Inangngu wanua*) Di Miangas

Politik tidak lepas dari persoalan kekuasaan, wewenang, kebijaksanaan dan pembagian yang pada umumnya berada pada negara, sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan. Namun tidak bisa dipungkiri ada gejala-gejala kekuasaan yang sifat dan tujuannya sewaktu-waktu dapat mempengaruhi negara. Sifat dan tujuan dari gejala kekuasaan yang nonnegara dalam hal ini salah satunya adalah lembaga adat. Pranata sosial atau lembaga masyarakat inilah yang membentuk negara sebagai organisasi kekuasaan.

Struktur Pemerintahan Desa Dan Struktur Kepemimpinan Adat Di Miangas

Miangas di zaman keresidenan Manado, merupakan satuan wilayah administratif *ke-jogugu-an* Nanusa, semenjak adanya keputusan pemerintah pusat (Surat Menteri Dalam Negeri No. 5/1/69 tertanggal 29 April 1969), pemukiman warga Miangas dinamakan desa dan dipimpin oleh *kapitelaut* atau sehari-harinya disebut *apita*□*au* ditemani jurutulis. Secara politis *kapitenlaut* ini pada umumnya dipilih berdasarkan keputusan dari 12 suku yang ada di Miangas dan tidak melalui proses dan mekanisme kerajaan yang pemimpinnya berdasarkan garis keturunan.

Selain struktur kepemimpinan formal dalam hal ini pemerintah desa, ada juga struktur kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan tradisional di Talaud pada umumnya dan Miangas khususnya di warisi secara turun-temurun dan oleh warga di sebut “kepemimpinan adat” di Miangas seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat 12 (suku), *Ratumbanua* dan *Inangnguwanua* merupakan yang membawahi 12 suku, dan setiap kelompok suku dipimpin oleh tetua yang disapa *Timaddu ruangnga*/ kepala suku, atau pemangku adat.

Peran *Ratu mbanua* dan *Inangngu wanua* Dalam Struktur Pemerintahan Desa di Miangas

Dalam struktur adat di Miangas *ratu mbanua* dan *inangngu wanua*, sebelum adanya struktur pemerintahan desa dan struktur keagamaan, sangat dihargai dan dihormati, serta memiliki perannya masing-masing. masalah pertahanan dan pemerintahan dalam wilayah

itulah tugas dari *ratumbanua*, kalau *inangguwanua* tugas dan perannya adalah membantu *ratumbanua* dalam menjalankan roda-roda pemerintahan adat, dimana tugas dan perannya adalah menyangkut masalah kesejahteraan masyarakatnya, menjembatani konflik dalam keluarga serta mencari jalan keluar dari masalah kedua belah pihak yang berkonflik, dimana bukan pada persoalan mencari letak kesalahan atau mencari siapa yang menyebabkan konflik untuk diberikan sanksi (hukum adat). Melainkan baik *ratumbanua* dan *inangguwanua* merupakan mediator dalam mengumpulkan tetua adat serta masyarakatnya untuk menyelesaikan persoalan diatas dengan cara kekeluargaan.

Dengan adanya struktur pemerintahan desa, lembaga adat yang ada di Miangas mulai dilebur menjadi bagian dari struktur kelembagaan desa. Peran *ratumbanua* dan *inangguwanua* hanya sekedar simbolisasi dalam mengisi acara seremonial. Seperti upacara adat, kunjungan pejabat, dan acara perkawinan.

Dari amatan peneliti serta hasil wawancara dengan narasumber, bahwa kelembagaan adat serta peran *ratumbanua* dan *inangguwanua* sebagai *primus inter pares*. Tidak lagi seperti dulu, dimana peran *ratumbanua* dan *inangguwanua* serta kelembagaan adat pada umumnya menjadi lemah dengan hadirnya beberapa struktur kelembagaan kekuasaan di dalam negara, sehingga apa yang disebut sebagai “kearifan lokal” tidak terpelihara malah dari hari-kehari semakin terkikis.

Didalam UUD 1945 Amandemen IV, pasal 28I ayat 3 dan pasal 32 ayat 1 dan Ayat 2. Serta UU No 32 Tahun 2004 “Tentang Pemerintah Daerah” Bab I pasal 2 ayat 9. Negara Indonesia dengan kemajemukannya memiliki kewajiban untuk mengakui, menghormati, menjamin dan memelihara serta memajukan identitas budaya dan masyarakat tradisional yang didalam terdapat nilai-nilai budaya seperti, hukum adat, bahasa daerah yang selaras dengan perkembangan zaman, sejauh nilai-nilai budaya itu hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Di Miangas Misalnya, dalam penamaan *ratumbanua* dan *inangguwanua* mereka alih bahasakan kedalam istilah jawa yaitu, *mangkubumi* I dan *Mangkubumi* II, sepintas istilah *mangkubumi* terkesan enak di dengar, namun apabila peneliti meninjau kembali baik dari UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004, penamaan *mangkubumi* yang dipakai oleh para pejabat yang berkunjung atau para penyelenggara kekuasaan negara di Miangas dalam menyapa *ratumbanua* dan *inangguwanua*, tentunya menyalahi apa yang menjadi aturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sebagai “beranda depan” ataupun penamaan lain yang teralamatkan, seperti “benteng Pancasila”, “garda terdepan”, sampai didirikannya 4 buah tugu sebagai penanda supremasi pertahanan bangsa oleh pemerintah, hanyalah sebatas membangkitkan phobia nasionalisme semata, dan sekedar wacana dari pemerintah untuk mengisi lembar halaman dalam media cetak maupun online.
2. Program pembangunan yang telah diagendakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, secara kasat mata memberi kemudahan bagi masyarakat di Miangas. Fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, hanya fasilitas yang menunjang kerjasama antar kedua negaralah yang sampai sekarang selalu siap ditempat. Sedangkan fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk pelayanan akan kebutuhan masyarakat hanyalah proyek mubazir, kosong dan hanya menjadi tempat rayap dan kepiting laut,

selain itu Keterbatasan akan kebutuhan pendidikan dengan minimnya tenaga pengajar tidak menjadi perhatian serius dari pemerintah.

3. Dengan adanya penempatan beberapa personil aparat sipil dan aparat pertahanan keamanan di Miangas dari luar daerah, mempengaruhi struktur sosial masyarakat Miangas, contohnya penamaan Ratu mbanua dan Inangngu wanua dialih bahaskan ke dalam istilah Jawa "*Mangkubumi I* dan *Mangkubumi II* semakin menggambarkan adanya dominasi kekuasaan negara. dimana wilayah yang kecil tidak berimbang dengan adanya penempatan beberapa personil aparat negara. Hal ini merupakan pelemahan terhadap nilai-nilai bahasa daerah sebagai budaya nasional.
4. Pengabaian terhadap nilai-nilai adat oleh masyarakat, menandakan pemerintah gagal didalam memelihara nilai-nilai adat, bahasa dan tradisi yang menjadi kearifan lokal seperti yang diamanatkan di dalam konstitusi negara ini, yang dituangkan ke dalam UUD 1945. Seyogyanya masyarakat dan pemerintah sama-sama mempunyai peran penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dengan memelihara kearifan lokal sebagai bagian dari ketahanan nasional.
5. Masyarakat cenderung pragmatis dan bersikap selalu bergantung dan berharap kepada pemerintah, sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai kearifan lokal yang dulu dilakoni oleh para generasi sebelumnya tidak ditemukan lagi.
6. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan struktur kelembagaan desa, peran lembaga adat (*ratu mbanua* dan *inangngu wanua*) mulai direduksi dalam struktur kekuasaan negara dan terkesan hanyalah simbolisasi dalam mengisi acara-acara seremonial.
7. Dengan hadirnya kekuasaan negara di Miangas, bukan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Malah oknum-oknum penyelenggara kekuasaan negara dengan mengatasnamakan negara untuk kepentingan pribadi dan golongan.
8. Ditengah-tengah keterisolasian dan keterbelakangan dengan faktor ekonomi yang rendah dan minimnya sumberdaya manusia, serta jauh dari pusat perekonomian yang tidak ditunjang dengan sarana transportasi yang memadai, tidak adanya ketersediaan BBM untuk melaut, serta ketidaktersediaanya infrastruktur yang memadai membuat perekonomian masyarakat terlihat stagnan. Sehingga dengan adanya pengaruh budaya materialisme dan pemanjaan oleh pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Miangas.

Saran

1. bahwa dengan harapan ke depan hasil karya ilmiah ini dapat menjadi referensi, serta panduan bagi para peneliti yang akan mengembangkan studi tentang wilayah perbatasan.
 2. Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia dengan melaksanakan program-program yang tepat guna, membekali masyarakat dengan berbagai keterampilan sesuai dengan karakteristik wilayah, sehingga masyarakat lebih diorientasikan pada pembangunan ekonominya.
 3. Lebih memperhatikan masalah yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan BBM bagi para nelayan agar mereka dapat melaut, menyediakan tempat penampungan sementara dari hasil tangkapan, seperti gudang es (cool store). Menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat, memperlancar sistem komunikasi dan transportasi ke Miangas, agar kedepan masyarakat semakin diberdayakan.
 4. Pemerintah seharusnya menggali kembali keterampilan yang ada di dalam masyarakat berupa hasil-hasil kerajinan tangan, seperti topi dan tikar anyaman dari pandan. Hasil-hasil ini kemudian menjadi tambahan pendapatan bagi
-

masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih mandiri, dan tidak selamanya bergantung pada pemerintah.

5. Pemerintah seyogyanya menjaga dan menghormati lembaga adat sebagai mitra pemerintah sesuai dengan yang diatur oleh perundangan-undangan. Menghargai nilai-nilai budaya serta memelihara kearifan lokal yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat, perlu adanya penguatan kembali terhadap pranata sosial serta membangkitkan kembali identitas sosial untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.
6. Diharapkan masyarakat lebih menjaga tradisi yang ada, seperti upacara adat, hukum adat, dan bahkan tradisi *mancari* atau *mamancari* untuk bertahan hidup. Agar tidak selamanya harus bergantung kepada pemerintah.
7. Harapan terakhir peneliti agar para penyelenggara kekuasaan negara di Miangas, diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan tidak memanfaatkan atau mengatasnamakan negara hanya untuk sekedar kepentingan pribadi dan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Mustafa *Menata Pulau-pulau Kecil di Perbatasan. Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik*. Penerbit Buku Kompas, 2006
- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Jurnal Politik 16. Penerbit, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:1996.
- Bara, Gusti Andre “Miangas: Cerita, Fakta dan Harap dari Utara” dalam Cyber Sulut (www.cybersulut.com/PeopleExpertColumn/8991246)
- Budiardjo, Miriam 2006. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Penerbit, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006.
- _____, 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Bugin, Burhan. *Bangsa Diantara Nasionalisme dan Primordialisme*, Harian Surya, 21 Desember 1993, hlm. 6
- Collins, T. James, 2005. *Bahasa Melayu Bahasa Dunia, Sejarah Singkat*. KITLV-Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Dahl, Robert, A. Analisis Politik Modern. Diterjemahkan oleh Bayu Suryaningrat., (Dewaruci Press, Jakarta: 1980).
- _____, *Modern Political Analysis*. Fifth printing. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1965.
- Denis Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya. Batas-batas Pembaratan*. 1996, Penerbit PT GramediaPustaka Utama, Jakarta.
- Efriza, *Ilmu Politik, Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan* (Bandung, Alfabeta:2008).
- Frankel Joseph, Hubungan Internasional. Diterjemahkan oleh Laila. H. Hasyim, Cetakan kedua. Penerbit. Bumi Aksara, Anggota IKAPI, Jakarta, 1991.
- Gilbert W. Fairholm, *Organizational Power Politics: Tactics in Organizational Leadership*, 2nd Edition (Santa Barbara: Praeger, 2009)
- Harsono, Andreas “Miangas, nationalism and isolation”. Dalam Tempo, No. 13/V/November 30- December 06, 2004; Asia Views, Edition: 47/1/December/2004.6 ps.
-

- Hoetagaol, M. Sophia, Nono S.A Sumampouw, Julianto Parauba, Rony Tuage , Mulyadi Pontororing. *Studi Tentang Aspek-Aspek Sosial-Budaya Masyarakat Daerah Pebatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas*, Kerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado, (Kepel Press, Yogyakarta, 2012).
- Keraf, S. A. 2010, *Etika Lingkungan hidup*. Penerbit, Buku Kompas, Jakarta: 2010.
- Koentjaraningrat, 2009 : *Pengantar Ilmu Antropologi*. Edisi revisi (Rineka Cipta, Jakarta; 2009)
- _____, 1990. *Sejarah Teori Antropologi II* (Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta; 1990.
- Kusnaka, Adimiharjo. *Hak-hak sosial Budaya Masyarakat Adat*, dalam *Menggugat Posisi Adat Terhadap Negara*. Jakarta: Lembaga Pers dan Pembangunan, 1999.
- Korten, D.C., dan Sjahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan obor, 1988.
- Lam Herman Johannes, *Miangas (Palmas)* (Batavia: G. Kolf & Co.,1932)
- Lapian B. Adrian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad ke XIX*. Komunitas Bambu. Jakarta.
- Linton. Ralph. *The Study of Man, an Introductory*, Student's Edition, Appleton-Century-Crofts Inc., New York, 1936.
- Logemann, J.H.A. 1948. *Over de Theorie van een Stelling staatsrecht*. Leiden : Universiteit Pers Leiden.
- Mac Iver, Robert M, *The Web of Goverment* (New York: The MacMillan Company, 1961)
- Mac Iver, Robert. M and Page, Charles. H. *Society*. New York: Barnes and Noble College Outline Series, 1960.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Sekretariat Jendral MPR RI, 2007.
- Madjowa Verrianto: “Warga Miangas Butuh Tambahan Guru”, Tempo interaktif, Rabu, 23 Mei 2007
- Pokok-Pokok Antropologi Budaya/editor T.O Ihromi.-ed.8.- (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 1996)
- Rusadi Kantaprawira. 1988. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*.Bandung: Sinar Baru
- Salindeho & Sombowadile, 2008.Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro: *Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Perbatasan*. Puspada, Jogja.
- Sarundajang, S.H, 2011. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Cetakan ketiga edisi revisi, (Kata Hasta Pustaka, Jakarta; 2011).
- Selo Soemardjan- Soelaeman Soemardani (eds). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Edisi Pertama. Djakarta: Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.
- Sjamsuddin, N, 1989. *Integrasi Politik Di Indonesia*. Penerbit, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1989.
- Soehino,1986, *Ilmu Negara*. (Liberty Yogyakarta; *Jayeprawiran 21, 23*, Yogyakarta 55112, 1986)
- Soerjono Soekanto, 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Ketujuh, Penerbit. Universitas Indonesia-Press, Jakarta:1981.
- Soetiknya, Imam. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: UGM,1990.
- Stephen P. Robbins, *Organisational Behaviour: Global and Southern African Perspectives*, 2nd Edition (Cape Town: Pearson Education South Africa (Pty) Ltd., 2009)
-

- Strong, C. F., *Konstitusi- konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*. Nusa Media: Bandung, 2004.
- Sudarsono, Juwono, editor, 1991. *Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik; Sebuah Bunga Rampai. Kumpulan tulisan-tulisan para ahli dari bidang Ilmu Antropologi, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan tulisan dari Bapak Sosiologi Indonesia Selo Soemardjan*. Cetakan kelima oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta; 1991.
- Sugihardjanto Ali, dkk. *Globalisasi Perspektif Sosialis*. Cetakan Pertama. Penerbit. Cubuc, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Penerbit, CV. Alfabeta, Bandung; 2011.
- Suhady Idup dan Sinaga A. M, 2009. “Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesi, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Sumarsono, dkk. 2005. “Pendidikan Kewarganegaraan”. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syafiie K Inu & Azhari, 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Penerbit, PT Refika Aditama, Bandung; 2005.
- Ulaen J. Alex, Triana Wulandari, Yuda B. T Tangkilisan. *Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas- Filipina 1928-2010; Dua Nama Satu Juragan*. Penerbit, Gramata Publishing, Jakarta: 2012.
- _____, Paulina Nugrahini, Christian Setiawan, Asrullah Dukalang, Alinabur. *Studi Tentang Sosial Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat Pulau Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Kerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado, Penerbit, Kepel Press, Yogyakarta, 2012.
- _____, 2010. *Nusa Utara Dalam Sejarah Bahari; Kumpulan Tulisan 2003-2004*. Penerbit, Yayasan Marin-CRC Manado, 2010.
- _____, 2003, *Nusa Utara Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*. Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- _____, *Laut Yang Menyatukan: Mengungkap ruang-jejaring Laut Maluku, “Maritim Sebagai Faktor Pemersatu Bangsa dari Perspektif Sejarah”* Makalah Pengantar Dialog Kesejarahan di Ambon, 2010
- _____, “Miangas (Las Palmas) dalam Dinamika Wilayah Perbatasan Bahari”, dalam Konferensi Nasional Sejarah ke- 9, di Jakarta, 5 – 7 Juli 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 “Tentang Pertanahan”
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, “Tentang Pemerintahan Desa”
- Van Leur, J. C. *Indonesian Trade and Society, Essay in Asian Sosial and Economic History*, 1967.
- Widodo, Joko, 2001. *Good Governance, Telaah dari dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi, Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Penerbit, Insan Cendekia, Surabaya; 2001.
- Weber Max, *Essay in Sociology*, translated and edited by H-H Gerth and C. Wright Mills, Oxford University Press, New York 1946.
-

Zakaria, R. Yando, 2000. *Abih Tandeh. Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru*, Jakarta: ELSAM

Daftar Publikasi Media Tentang Miangas dalam Majalah Online dan Cetak:

“Berkunjung ke pulau tempat transit para pelaku Bom Bali” Jawa Pos 13 Oktober 2005.
www.jawapos.co.id. (Miangas disebut sebagai tempat transit teroris).

Gatra, 19 Februari 2009 dalam <http://www.gatra.com/artikel.php?id=123414>) dan Gatra, 4 Juli 2005.

Tempo interaktif, Senin, 17 April 2006. Keterangan Pers Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, dilaporkan oleh Endang Purwanti.

<http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/15/03175473/nasionalisme.itu.mahal>.

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/1881037-sengketa-pulau-miangas-bagian/#ixzz1UALABO1k>

http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=3644&Itemid=57

Sumber Lain:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

“Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan NKRI” Komisi Penyiaran Indonesia (Lembaga Negara Independen), 2012, dalam (www.kpi.go.id)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dalam (http://www.dephut.go.id/files/pp_26_08.pdf), diunduh 6 Maret 2013.

Video Dokumenter, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sulawesi Utara, 2011.

“Pengembangan Pembangunan Daerah Perbatasan” dalam seminar di hotel Granpuri ruang pertemuan Anoa III, 24 April, Manado, 2013.